

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM
PEMBANGUNAN JALAN DI DESA MELAI KECAMATAN RANGSANG BARAT
TAHUN 2013-2014**

By: Syaiful Fikri

Tokehsagu3@gmail.com

Supervisor: Auradian Marta S.IP MA

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The background of this study by no completion of the construction of roads in the village to the village Melai Kedabu Rapat Meeting. The second village is an outlying village Government Kepulauan Meranti, so the road construction affects the lives of border communities. Development Planning Meeting Melai Kedabu Rapat already started in 2000, when the Government Bengkalis, however the project is dormant and unresolved. Meranti Islands District began planning the construction in 2013 until today the project has not been resolved. The purpose of this study to determine function Meranti Islands District Government in the construction of the road.

The method used is qualitative research. Qualitative research can be regarded as the research that produced the data descriptive of the words spoken and written and behavior that can be observed from the people studied. In the research problems using the theory of functions of government and local government management.

Based on the analysis the authors of the roads in the village Melai, are not optimal Local Government in carrying out its functions, it can be seen from the Regional Government management is not maximized in the implementation of the road. The Local Government Management includes (planning, organizing, mobilization, monitoring and evaluation).

Keywords: *Function Government, Local Government Management in Rural Road Development ,, Melai*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh nusantara. Jika belajar dari pengalaman, sistem sentralisasi telah gagal membawa kesetaraan pembangunan tersebut, oleh karena itu fokus pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, hal ini dikarenakan jarak yang lebih dekat dengan masyarakat, serta Pemerintah Daerah lebih memahami karakter dan masalah daerah yang dihadapi. Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu diharapkan dengan meratanya pembangunan diseluruh pelosok Desa mampu mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Pemerintah pusat telah merevisi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, puncaknya yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang untuk setiap daerah agar bisa mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Daerah yang merasakan kebebasan dalam mengatur wilayahnya secara mandiri. Dasar hukum terbentuknya Kabupaten ini yaitu Undang-undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu minimnya akses jalan yang baik, pembangunan infrastruktur jalan sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan dengan jalan yang baik mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta mempermudah segala urusan masyarakat. Salah satu yaitu jalan yang menghubungkan Kecamatan Rangsang Barat dengan Rangsang Pesisir, tepatnya di desa Melai (Kecamatan Rangsang Barat) menuju Desa Kedabu Rapat hingga Desa Tanah Merah (Kecamatan Rangsang Pesisir) yang hanya menggunakan akses

jalan tidak beraspal, dan jalan yang bergelombang atau tidak rata, hal ini paling dirasakan masyarakat apabila saat musim hujan, jalan menjadi licin dan membahayakan masyarakat, baik yang mengendarai maupun orang disekitar.

Desa melai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan luas wilayah 19,2 Km. Jarak pusat pemerintahan Desa dengan ibukota Kecamatan (Bantar) yakni 23,4 Km. Jarak pusat pemerintahan Desa dengan ibukota Kabupaten (Selatpanjang) adalah 88,7 Km. Hingga tahun 2014, jumlah penduduk Desa Melai adalah 1.451 jiwa dan mayoritas mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani kelapa, nelayan, dan peternak ayam.

Pembangunan jalan yang telah direncanakan pada tahun 2000 saat Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, namun pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum kembali melakukan perencanaan dan pelaksanaan jalan tersebut, namun hingga saat ini (tahun 2015) pembagnunan jalan tersebut belum bisa diselesaikan. Namun yang menarik dari fenomena ini yaitu dana yang terealisasi selama tahun 2013 tersebut hanya mencapai 2 Miliar atau berkisar 16,77 persen dari perencanaan awal dan 60 persen pada tahun 2014. Hasil ini tentu sangat jauh dari harapan, baik harapan masyarakat maupun instansi terkait. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan kegagalan suatu Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 sebesar Rp.1,3Triliun lebih dan meningkat Rp. 200 Miliar dari tahun 2012 serta 65 persen dari dana APBD tersebut direncanakan untuk belanja langsung. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Adapun beberapa masalah yang bisa dilihat dari lapangan yaitu:

1. Tidak mampunya pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah, dan hanya terealisasi 16, 77 persen pada tahun 2013 dan hanya 60,396 persen pada tahun 2014
2. Jalan yang direncanakan, tidak bisa diselesaikan
3. pemerintah tidak memperpanjang kontrak dari pihak swasta
4. Kurang tegasnya pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pihak swasta sehingga jadwal pelaksanaan terlambat 3 bulan
5. Koordinasi pelaksanaan tidak berjalan baik.

Berdasarkan hasil dilapangan tersebut, menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa menjalankan fungsi yang dimiliki secara maksimal. Permasalahan infrastruktur jalan Melai Kedabu Rapat merupakan suatu masalah yang serius, karena berkaitan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang di cita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Permasalahan diatas di ikuti dengan permasalahan ekonomi, dengan segala keterbatasan tersebut, proses perekonomian masyarakat menjadi kendala, walaupun secara data tingkat ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tidak dirasakan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menjalankan segala yang telah menjadi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Tabel 1.1

Anggaran Peningkatan Jalan Melai Kedabu Rapat Tahun 2013 dan 2014

Jika melihat jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013 yaitu sebesar Rp.399 M, menunjukkan banyaknya program yang tidak mampu dimaksimalkan

Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki penulis, maka penulis hanya bisa memfokuskan pada satu permasalahan yaitu infrastruktur jalan melai kedabu rapat yang merupakan program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun alasan pemilihan permasalahan ini dikarenakan permasalahan jalan Melai Kedabu Rapat ini sudah lama harus mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Daerah bahkan saat belum mekar Kabupaten Kepulauan Meranti jalan ini sudah tidak layak untuk dilewati, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti baru memperhatikan jalan ini pada tahun 2013 berupa program jalan Melai Kedabu Rapat yang direncanakan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, namun hingga saat ini, perubahan belum dirasakan secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto Bagong, 2010:5).

Penelitian ini dilakukan di Desa Melai melalui program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Melai merupakan wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Meranti dan merupakan wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia, sehingga akses jalan sangat penting bagi masyarakat setempat agar mempermudah akses menuju pusat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

Berdasarkan fakta, jalan ini sudah direncanakan pada tahun 2000 namun hingga saat ini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah, oleh karena itu alasan pemilihan lokasi jalan di Desa Melai. Informan dalam penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses pengerjaan jalan tersebut. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dampak serta situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. *Indepth interview*, wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Observasi partisipatif, observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah situasi dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi yaitu sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menapsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya, dan menemukan kaedah-kaedah yang mengaturnya (Emzir, 2012:36).
- c. Dokumentasi, teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti (Widodo, 2012:61). Dokumentasi

dalam penelitian sebagai sumber data karna banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menapsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Teknis analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan. Analisis data, menurut Putton dalam Meleong (2007:280) adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini menggunakan kualitatif, data yang terkumpul dikelompokkan menurut kebutuhan. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga tahun 2015, proyek pembangunan Jalan Melai Kedabu Rapat belum bisa dilanjutkan, hal ini dikarenakan adanya usaha dari Pemerintah Daerah untuk mengusulkan pembangunan jalan tersebut

diajukan dan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Riau. Namun, bagi masyarakat setempat, adanya kekhawatiran bahwa pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 kembali terbengkalai seperti yang telah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2000.

A. Perencanaan Pembangunan Jalan di Desa Melai Tahun 2013- 2014

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau Daerah bersangkutan. Arthur W. Lewis (1965) perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat merupakan jalan yang strategis bagi peningkatan perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti. Jalan yang menghubungkan kedua Kecamatan dan kedua Desa dipergesekan tersebut harus secepatnya terealisasi, dikarenakan sangat pentingnya jalan tersebut bagi masyarakat dan dari segi ekonomi, jalan tersebut sangat strategis.

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perencanaan jalan Melai Kedabu Rapat merupakan

pembangunan jalan yang strategis dan merupakan jalan yang penting bagi masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ditambah daerah ini merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan, sehingga harus ada perhatian khusus terhadap daerah ini.

Namun pada tahun 2014 Pemerintah Daerah berupaya untuk tetap komitmen dalam penyelesaian pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat dan kembali tertuang di dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perencanaan pembangunan jalan di Desa Melai tidak menggunakan jasa konsultan perencanaan. Secara hukum, hal ini sudah melanggar aturan yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan ini belum sampai kepada hukum. Perencanaan suatu hal yang sangat penting dalam berhasilnya suatu program, untuk merencanakan suatu program fisik dibutuhkan tenaga ahli yang benar-benar menguasai tentang pelaksanaan dilapangan, sehingga output yang di inginkan sesuai dengan harapan. Baik harapan masyarakat maupun harapan Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam pembangunan jalan di Desa Melai, pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013-2014 hanya berfungsi sebagai penganggaran (*budgeting*) dan tidak masuk kedalam teknis perencanaan. Teknis perencanaan program diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

B. Pengorganisasian Pembangunan Jalan di Desa Melai

Pengorganisasian adalah suatu usaha kelompok pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

G. R. Terry (1961) mengatakan, pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Jika melihat dilapangan, pekerjaan yang dilakukan kurang terorganisasi dengan baik, sehingga hasil (*output*) dari program tersebut seringkali terbengkalai dan tanpa tindak lanjut berikutnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat sudah melakukan beberapa pengorganisasian yang kuat, sehingga mampu menjalankan tugas dan mampu menyelesaikan pembangunan, namun kendala kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas membuat terhambatnya pembangunan jalan.

Bukti nyata dari usaha Pemerintah untuk menguatkan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat yaitu bisa dilihat dari ketatnya proses pemilihan kemitraan (kontraktor) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun

2014, terdapat lima puluh dua calon rekanan yang ingin bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Melai.

Belajar dari pengalaman tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha menseleksi calon kontraktor dengan langkah dan prosedur yang telah ditetapkan. Dari lima puluh dua calon tersebut, terpilih satu pemenang lelang, yaitu PT. Ananta Jaya Pradana, yang beralamat di Jalan Minang Kabau Jakarta Selatan.

Namun dalam pelaksanaannya, pihak kontraktor belum serius dalam menjalankan pengerjaannya, hal ini bisa dilihat dari keterlambatan mereka dalam memulai proyek tersebut. Sehingga pada tanggal 29 Desember, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan kontrak kepada pihak kontraktor tersebut yang seharusnya habis kontrak pada tanggal 31 Desember tahun 2014.

Berdasarkan hasil dilapangan, pengerjaan jalan tersebut tidak bisa diselesaikan dan resiko yang harus diterima adalah, pihak kontraktor masuk kedalam buku hitam dan di backlis dari perusahaan pengadaan barang/jasa serta tidak bisa mengikuti proses pelelangan selama dua tahun diseluruh Indonesia serta uang jaminan sebesar lima persen dari kontrak yaitu sebesar tujuh ratus juta akan masuk kedalam kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun pelaksanaan pada tahun 2013, pihak rekanan juga tidak menyanggupi pelaksanaan tersebut dan harus diputus kontrak oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Penggerakan Organisasi Pmbangunan Jalan Desa Melai

Menurut G. R. Terry (1961), penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Karena itu penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggerakan meliputi kegiatan memberi motivasi dan mengarahkan kepada masing-masing saran unit kerja.

Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan penggerakan, yaitu kepemimpinan, sikap moral, komunikasi, insentif supervisi, dan disiplin.

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik belum tentu mampu menghasilkan suatu *output* yang di inginkan. Inti dari suatu perencanaan dan pengorganisasian adalah penggerakan atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut, hal ini dikarenakan suatu perencanaan hanya akan menjadi catatan diatas kertas apabila tidak di implementasikan dalam suatu program dan kegiatan, sehingga menghasilkan hasil yang nyata di dalam masyarakat.

Permasalahan yang mendasar adalah, bergantinya posisi pejabat yang memimpin di Dinas Pekerjaan Umum yang membuat pelaksanaan harus dimulai dari awal tanpa pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Hal ini dikarenakan, pembangunan jalan Melai Kedabu

Rapat merupakan daerah terluar Kabupaten Kepulauan Meranti, akses laut hanya bisa melewati Selat Malaka, sedangkan Selat Malaka merupakan laut lebas dan memiliki gelombang, tekanan angin yang jauh berbeda dibandingkan laut-laut lainnya.

Jika melihat dari perencanaan dan pelaksanaan, pengerjaan jalan Melai Kedabu Rapat dilakukan di akhir tahun, Momen akhir tahun merupakan puncaknya fenomena dilaut, mulai dari air pasang yang meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya, kuatnya tekanan angin, serta ombak yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya sudah memahami kondisi geografis di daerahnya, namun karena berbagai permasalahan teknis, perencanaan dan pelaksanaan belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Inilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Permasalahan yang mendasar adalah, bergantinya posisi pejabat yang memimpin di Dinas Pekerjaan Umum yang membuat pelaksanaan harus dimulai dari awal tanpa pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Hal ini dikarenakan, pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat merupakan daerah terluar Kabupaten Kepulauan Meranti, akses laut hanya bisa melewati Selat Malaka, sedangkan Selat Malaka merupakan laut lebas dan memiliki gelombang, tekanan angin yang jauh berbeda dibandingkan laut-laut lainnya.

Jika melihat dari perencanaan dan pelaksanaan, pengerjaan jalan Melai Kedabu Rapat dilakukan di akhir tahun, Momen akhir tahun merupakan puncaknya fenomena dilaut, mulai dari air pasang yang meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya,

kuatnya tekanan angin, serta ombak yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya sudah memahami kondisi geografis di daerahnya, namun karena berbagai permasalahan teknis, perencanaan dan pelaksanaan belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Inilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Pemerintah Daerah sudah menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian jalan tersebut, begitu juga dengan kontraktor pelaksana. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga proyek ini tertunda. Adapun sanksi yang diterima oleh pihak kontraktor adalah dilarang melakukan pengadaan barang/ jasa selama dua tahun diseluruh Indonesia dan dipotong uang jaminan sebesar lima persen dari kontrak yaitu sebesar tujuh ratus juta rupiah. Peran masyarakat juga penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga apabila ketiga elemen ini bekerja sama, akan menghasilkan *output* yang lebih baik.

D. Pengawasan Pembangunan Jalan di Desa Melai

Terry (1961) merumuskan pengawasan atau pengendalian sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan.

Pengendalian adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengendalian

meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila terdapat suatu tindakan yang menimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif sesuai dengan langkah, prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat merupakan program yang tidak luput dari pengawasan. Pihak yang mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini yaitu pihak Konsultan yaitu PT. Raissa Gemilang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK).

pengawasan yang dilakukan sudah optimal, namun kurang tegasnya pihak pengawasan terhadap pelaksana, sehingga membuat hasilnya tidak maksimal.

Sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum berlangsung pada musim penghujan, sehingga pelaksanaan kegiatan agak terhambat. Waktu pelaksanaan tidak cukup karena terlambat pada waktu pengesahan APBD Perubahan. Perlu penambahan tenaga Teknis untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan agar pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu. Terbatasnya sumber daya aparatur yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

E. Evaluasi Pembangunan Jalan di Desa Melai

Program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2013-2014 hingga saat ini belum selesai, hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Adapun hasil evaluasi pembangunan jalan Melai Kedabu Rapat yaitu : waktu perencanaan maupun waktu pelaksanaan, Selama 2 tahun pelaksanaan proyek jalan, hanya terealisasi sebesar 60, 396 persen, kurangnya sumber daya.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu dari Misi Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jika melihat data dan hasil dilapangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti totalnya telah menganggarkan Rp. 29 M dan anggaran sebesar itu sudah besar jika melihat kebutuhan jalan akan dibangun. Namun, para pelaku dilapangan yang gagal memanfaatkan dengan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Tercatat, pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum memiliki 19 Program dan 340 Kegiatan, hal ini merupakan program dan kegiatan yang terbanyak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, bukan hanya memiliki program dan kegiatan yang lebih banyak dibandingkan SKPD yang lainnya tetapi anggaran yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum merupakan anggaran tertinggi diantara SKPD lainnya, namun jika dibandingkan prestasi atau realisasinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki realisasi pekerjaan terendah yaitu hanya 28 persen program dan kegiatan yang mampu terealisasi. Setelah Sepanjang tahun 2013, pengerjaan pembangunan jalan hanya mampu terealisasi 16,77 persen dari 15 Miliar anggaran yang direncanakan yaitu hanya 2 M saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta,

Azizy, Qodri. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks. Gorontalo

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan PARIBA. Jakarta

Papasi. 2010. *Ilmu Politik Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Rineka Cipta. Jakarta

Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Utomo, Warsito. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*. Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress. Yogyakarta

Dokumentasi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan)
4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
6. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Skripsi :

- Ajeng Puspita Ningrum. 2014. *Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012*. Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru
- Mayena Yovi. 2010. *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006-2009 (Studi Pada Pembangunan Jalan Di Kota Tembilahan*. Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru
- Ryando Permana Putra. 2012. *Problematisa Objek Wisata Di Desa Buluh Cina Tahun 2009-2011*. Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru